

BAB II

SEJARAH KOTA BENGKULU DAN BIOGRAFI GUBERNUR SOEPRAPTO TAHUN 1978 – 1989

A. Letak Geografis Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu berada di pesisir barat Pulau Sumatra, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Secara posisi astronomis, wilayah ini membentang kurang-lebih antara sekitar 2–5° Lintang Selatan dan 101–104° Bujur Timur, dengan ibu kota di Kota Bengkulu. Batas wilayahnya: sebelah utara Sumatra Barat, timur Jambi dan Sumatra Selatan, selatan Lampung, serta barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Informasi dasar ini juga menegaskan karakter Bengkulu sebagai provinsi pesisir yang memanjang dari utara–selatan mengikuti jajaran Bukit Barisan di sisi timur dan jalur pantai di sisi baratnya.³³

Luas wilayah Bengkulu menurut publikasi statistik terbaru berada pada kisaran ±20,1 ribu km², menjadikannya salah satu provinsi berukuran menengah di Sumatra. Konfigurasi ruangnya khas: bagian barat berupa dataran pantai sempit yang terputus-putus oleh tonjolan bukit, sedangkan bagian timur didominasi punggung Bukit Barisan yang membentuk lereng curam, perbukitan, hingga plato tinggi di beberapa kabupaten pedalaman. Susunan fisiografis ini memengaruhi pola guna lahan (permukiman, sawah lahan basah di dataran rendah,

³³ Pemerintah Provinsi Bengkulu. “Sekilas Bengkulu” (profil resmi; koordinat dan batas wilayah). Diakses: 10 Agustus 2025.

kebun/perkebunan di lereng) dan sebaran aksesibilitas antarkabupaten/kota.³⁴

Sebagai provinsi pantai samudra, Bengkulu mempunyai garis pantai sekitar 525 km. Panjang garis pantai ini memperlihatkan besarnya ekspos wilayah terhadap dinamika oseanografi (arus, gelombang, abrasi) sekaligus peluang ekonomi pesisir (perikanan tangkap, jasa pelabuhan, dan pariwisata bahari). Di wilayah metropolitan provinsi—yakni Kota Bengkulu—panjang pesisirnya sendiri hanya sekitar ±17 km, tetapi menjadi simpul aktivitas ekonomi pesisir dan konektivitas laut, terutama di sekitar Pelabuhan Pulau Baai.³⁵

Iklim Bengkulu termasuk tropika lembap dengan curah hujan tahunan yang relatif tinggi dan variasi musiman yang dipengaruhi angin monsun serta dinamika samudra-atmosfer di Samudra Hindia. Pemantauan operasional menunjukkan pada dasarian-dasarian terkini (mis. akhir 2024–pertengahan 2025) sebagian besar wilayah mengalami kategori hujan rendah–tinggi bergantung lokasi dan waktu, mencerminkan variabilitas spasial yang kuat antara pesisir, lereng Bukit Barisan, dan pulau-pulau lepas pantai seperti Enggano.³⁶

Secara hidrologi, banyak sungai berarah umum timur-barat (dari pegunungan menuju pantai), membentuk DAS

³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. “Luas Wilayah di Provinsi Bengkulu” (tabel statistik). Diakses: 10 Agustus 2025.

³⁵ Riki Fadli, M. Arif, dan Dwi Yuliana, “Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu,” *Enggano Journal*, Vol. 4, No. 2 (2019): 120–135.

³⁶ BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu. “Analisis Curah Hujan Dasarian I November 2024” dan “Analisis Curah Hujan Dasarian III Juli 2025”, diakses: 10 Agustus 2025.

pendek-menengah dengan debit responsif terhadap hujan orografis. Kombinasi lereng curam, hujan tinggi, dan koridor dataran pantai sempit membuat beberapa segmen pesisir rawan erosi pantai dan banjir rob, sementara daerah lereng berpotensi gerakan tanah saat puncak musim hujan. Kondisi ini penting dipertimbangkan dalam penataan ruang, mitigasi bencana, dan pengembangan infrastruktur publik.³⁷

Dari sisi demografi, estimasi BPS menempatkan jumlah penduduk Bengkulu sekitar 2,11 juta jiwa (pertengahan 2024), tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota. Laju pertumbuhan moderat, dengan kepadatan relatif rendah-menengah jika dibanding provinsi padat di Sumatra bagian timur. Struktur penduduk yang relatif muda dan persebaran yang timpang antara pesisir, lereng, dan pedalaman berdampak pada kebutuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan) serta jaringan transportasi lintas topografi.³⁸

Secara ekonomi, perekonomian Bengkulu tumbuh 4,62% pada 2024 (c-to-c) dan berlanjut 4,99% (y-on-y) pada Triwulan II 2025, menurut rilis resmi BPS. Dari sisi lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor utama PDRB, sementara penyediaan akomodasi dan makan-minum menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi dalam dua tahun

³⁷ Riki Fadli, M. Arif, dan Dwi Yuliana, "Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu," *Enggano Journal* 4, no. 2 (2019): 120–135.

³⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, *Provinsi Bengkulu dalam Angka 2025* (Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu, 2025).

terakhir—menandakan penguatan aktivitas jasa dan pariwisata daerah.³⁹

Garis pantai yang panjang dikombinasikan dengan agroekologi lereng Bukit Barisan membentuk basis mata pencaharian ganda: perikanan pesisir di koridor pantai dan perkebunan rakyat (sawit, kopi robusta, karet) di dataran tinggi. Data produksi 2024 menunjukkan sawit sebagai komoditas terbesar ($\pm 1,0$ juta ton), diikuti kopi 54 ribu ton. Secara nasional, Bengkulu termasuk produsen kopi terbesar ke-5 pada 2023, menegaskan peran historis kebun kopi rakyat—khususnya di Kepahiang dan Rejang Lebong—dalam ekonomi rumah tangga pedesaan.⁴⁰

Dari sisi kesejahteraan, persentase penduduk miskin turun menjadi 12,52% (September 2024) atau sekitar 261,15 ribu jiwa, membaik dibanding Maret 2024. Meski tren menurun, kantong-kantong kerentanan masih berkorelasi dengan wilayah perdesaan perkebunan/pesisir dan akses layanan dasar. Agenda penguatan hulu-hilir komoditas perkebunan, peningkatan nilai tambah perikanan, serta perbaikan konektivitas antarzona geomorfik menjadi kunci pengentasan berkelanjutan.⁴¹

³⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, “Ekonomi Bengkulu Triwulan II-2025 Tumbuh 4,99% (y-on-y),” *Berita Resmi Statistik*, 5 Agustus 2025, diakses 16 Agustus 2025, <https://bengkulu.bps.go.id>.

⁴⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, “Produksi Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman, 2024,” tabel statistik, diakses 16 Agustus 2025, <https://bengkulu.bps.go.id>

⁴¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, “Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun menjadi 12,52%,” *Berita Resmi Statistik* No. 05/01/17/Th. XXVIII, 15 Januari 2025, diakses 16 Agustus 2025, <https://bengkulu.bps.go.id>.

Secara sosial-kultural, struktur masyarakat Bengkulu terbentuk dari komunitas lokal pesisir-lereng dan arus transmigrasi yang intens sejak dekade 1960-an–1980-an. Penelitian mutakhir menunjukkan integrasi sosial berjalan relatif harmonis, dengan transmigran berkontribusi pada pembukaan lahan, pola permukiman baru, dan dinamika ekonomi desa, meski tetap menyisakan kebutuhan tata kelola sumber daya dan penguatan kohesi antarbudaya.⁴²

B. Sejarah Pemekaran Bengkulu Sebagai Provinsi

Perjalanan sejarah Bengkulu sebagai sebuah daerah otonom tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan militer pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menghadapi situasi yang sangat genting karena Belanda berusaha kembali menegakkan kekuasaannya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan mengatur kembali sistem pemerintahan di wilayah Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948, wilayah Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pembentukan provinsi-provinsi ini sekaligus disertai dengan penerapan pemerintahan militer karena situasi keamanan yang masih belum stabil akibat perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintahan militer dianggap penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan,

⁴² Heru Susetyo, Rini Damayanti, dan Agus Kurniawan, “Perspektif Integrasi Sosial dan Transplantasi Kultural: Studi Kasus Masyarakat Transmigran di Bengkulu,” *University of Bengkulu Law Journal* 9, no. 1 (April 2024): 55–72.

terutama yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan negara.⁴³

Dalam sistem tersebut, Keresidenan Bengkulu tetap menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Bengkulu menjadi wilayah penting karena dijadikan sebagai pusat komando perjuangan daerah Sumatera Selatan. Seiring dengan penetapan itu, pimpinan pemerintahan militer berpindah ke Bengkulu dengan Dr. A.K. Gani sebagai Gubernur Militernya. Posisi strategis Bengkulu menjadikannya basis pertahanan dan koordinasi perlawanan terhadap Belanda, terutama ketika Agresi Militer II dilancarkan pada awal tahun 1949. Pada saat itu, pasukan Belanda baru dapat memasuki Bengkulu sekitar bulan Januari 1949. Pertempuran yang terjadi memaksa pasukan Indonesia untuk melakukan pertahanan di berbagai titik penting. Di Bengkulu Selatan, markas pertahanan terakhir berada di Dusun Fajar Bulan, Kecamatan Masmambang, sedangkan di Bengkulu Utara pusat pertahanan berlokasi di Tambang Emas Lebong Tandai.⁴⁴

Meskipun Belanda sempat menduduki Keresidenan Bengkulu setelah kemerdekaan, penguasaan itu tidak berlangsung lama. Hal ini karena pada akhir tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut

⁴³ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 202.

⁴⁴ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 202.

membawa konsekuensi besar bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bengkulu. Pasukan Belanda pun ditarik dari daerah ini, sehingga masyarakat kembali menata kehidupannya dengan penuh semangat. Sejak saat itu, pemerintahan daerah Keresidenan Bengkulu mulai melakukan konsolidasi dan penataan ulang struktur birokrasi yang sebelumnya porak-poranda akibat perang.⁴⁵

Langkah awal yang ditempuh pemerintah daerah setelah pengakuan kedaulatan adalah melakukan inventarisasi pegawai negeri. Hal ini sangat mendesak karena sebagian besar pegawai negeri pada masa perang ikut bergabung dengan tentara dan terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Sejak tahun 1949 hingga dekade 1960-an, jabatan Residen Bengkulu mengalami pergantian beberapa kali. Tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan tersebut antara lain H. Hasan (1949–1953), H.M. Hosein (1953–1955), M. Sorimuda Pohan (1955–1958), Rajamat (1958–1960), R. Abdullah (1960–1962), Nawawi (1962–1964), dan M. Ali Amin, S.H. (1964–1968). Pergantian pimpinan tersebut menggambarkan adanya dinamika birokrasi di tingkat daerah.⁴⁶

Pembangunan Bengkulu kembali mengalami hambatan serius akibat berbagai gejolak politik nasional. Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 (G-30-S/PKI 1965) membawa dampak

⁴⁵ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 203.

⁴⁶ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 204.

besar, termasuk bagi stabilitas di daerah. Pemerintahan daerah terguncang oleh perpecahan politik dan pergolakan masyarakat. Situasi ini semakin diperparah dengan munculnya pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang sempat menggoyahkan kestabilan pemerintahan di Sumatera. Kondisi tersebut membuat roda pembangunan kembali tersendat.⁴⁷

Selain faktor politik dan keamanan, sistem demokrasi liberal yang berlaku pada masa itu juga memengaruhi dinamika pemerintahan di daerah. Persaingan politik yang tidak menentu membuat jalannya pemerintahan kurang stabil. Dalam situasi demikian, aspirasi masyarakat Bengkulu semakin menguat untuk memperoleh status sebagai daerah otonom tingkat I yang memiliki kewenangan penuh tanpa bergantung pada Provinsi Sumatera Selatan. Tuntutan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya kemandirian dalam mengelola potensi daerah, sekaligus sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan.⁴⁸

Gagasan agar Bengkulu berdiri sebagai daerah otonom tingkat I sesungguhnya sudah muncul jauh sebelum tahun 1960-an. Menurut catatan sejarah, ide tersebut pertama kali disuarakan oleh Mr. Hazairin, Residen kedua Bengkulu sekitar tahun 1946. Pemikiran ini juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal,

⁴⁷ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 206

⁴⁸ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 206.

seperti H. Hasan dan H.M. Hosein. Alasan utama yang dikemukakan ialah bahwa wilayah provinsi yang terlalu luas sering kali menjadi hambatan dalam penyebaran pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.⁴⁹

Sekitar tahun 1962, wacana pembentukan Provinsi Bengkulu kembali mengemuka dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Awalnya, isu tersebut berkembang secara individual dan terbatas, tetapi kemudian semakin meluas hingga menjadi pembicaraan publik. Perjuangan yang semula bersifat perorangan berubah menjadi kelompok, bahkan akhirnya terorganisir. Pada tanggal 29 Agustus 1962 dibentuk sebuah organisasi bernama *Panitia 9*. Organisasi ini terdiri dari sembilan tokoh daerah, antara lain St. Yakub Bachtiar (Ketua), M. Taher Dayoh, R. Abdullah, R. M. Akil, M. Zein Rani, Rivai Darwis, Mr. Thabri Hamzah, Bahaudin Zulkan, dan Adnan Ilyas. Meski masih bergerak secara sembunyi-sembunyi, Panitia 9 menjadi wadah resmi yang mengorganisir aspirasi masyarakat Bengkulu untuk menjadi daerah tingkat I.⁵⁰

Dukungan formal bagi perjuangan ini semakin menguat melalui keputusan DPRD-GR di tingkat kabupaten. Sidang DPRD-GR Bengkulu Utara pada 16 Oktober 1963, Rejang Lebong pada 4 November 1963, Bengkulu Selatan pada 27 November 1963,

⁴⁹ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 207.

⁵⁰ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 207.

serta Kotapraja Bengkulu pada 12 Desember 1963, seluruhnya menyatakan persetujuan agar Bengkulu menjadi daerah tingkat I. Keputusan tersebut kemudian dikonsolidasikan melalui Musyawarah DPRD-GR Tingkat II se-Keresidenan Bengkulu yang berlangsung pada 19–21 Desember 1963. Musyawarah tersebut secara aklamasi menyepakati agar Bengkulu dipisahkan dari Sumatera Selatan dan ditetapkan sebagai provinsi.⁵¹

Puncak perjuangan itu terjadi pada Kongres Rakyat Bengkulu yang digelar pada 15 Maret 1964. Kongres ini dihadiri 250 orang dari berbagai unsur, meliputi pemerintah daerah, DPRD-GR, partai politik, cendekiawan, dan kalangan sarjana. Karena keterbatasan sumber, penulis belum menemukan data nama-nama anggota yang turut menghadiri kongres tersebut. Hasil kongres menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan Bengkulu sebagai daerah tingkat I. Kedua, menyatakan kesediaan rakyat Bengkulu untuk mendukung penuh program nasional, seperti Panca Program Front Nasional dan Tri Program Pemerintah dalam rangka mensukseskan tuntutan tersebut. Pada saat itu pula dibentuk *Panitia Persiapan Daerah Tingkat I Bengkulu* dengan jumlah anggota sebanyak 62 orang.⁵²

⁵¹ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 208.

⁵² Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 209.

Pada 27 November 1965, DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan menggelar sidang ke-13. Dalam sidang tersebut, setelah mendengarkan pidato Adnan Ilyas mengenai tuntutan rakyat Bengkulu, dewan secara aklamasi menerima aspirasi tersebut. Selanjutnya, perjuangan dilanjutkan dengan mengirimkan delegasi kedua ke Jakarta untuk menemui Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Hasil perjuangan panjang itu kemudian membuahkan keputusan penting. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Bengkulu secara yuridis resmi ditetapkan sebagai provinsi baru. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.⁵³

Akhir dari perjuangan panjang itu ditandai dengan peresmian Provinsi Bengkulu pada 18 November 1968. M. Ali Amin, S.H. diangkat sebagai Penjabat Gubernur sekaligus penguasa pemerintahan daerah provinsi yang baru dibentuk. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/M/1968 tanggal 4 November 1968. Dengan demikian, Bengkulu secara resmi berdiri sebagai provinsi ke-26 di Indonesia, hasil dari perjuangan gigih para tokoh dan masyarakat yang menginginkan kemandirian dalam mengelola daerahnya.⁵⁴

⁵³ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 210.

⁵⁴ Arsyik Hawab dkk., *Sejarah Daerah Bengkulu* (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 216.

C. Bengkulu Sebagai Provinsi dan Perkembangan Kota

Bengkulu secara resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-26 Republik Indonesia pada 18 November 1968, setelah sebelumnya berstatus bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Kota Bengkulu ditunjuk sebagai ibu kota provinsi, dan sejak saat itu mengalami perkembangan yang signifikan dalam bidang administrasi maupun infrastruktur.⁵⁵ Sebelum terbentuk sebagai provinsi, Bengkulu berstatus sebagai kota kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Bengkulu, dengan wilayah seluas 17,6 km².⁵⁶ Satu tahun kemudian, status tersebut berubah menjadi kotapraja melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada masa itu, Kotapraja Bengkulu terdiri dari empat wilayah administratif dengan membawahi 28 kepemangkuan.⁵⁷

Pembentukan Provinsi Bengkulu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968. Penetapan resmi berlaku pada 1 Juni 1968, dengan Ali Amin dilantik sebagai gubernur pertama.⁵⁸ Seiring statusnya sebagai ibu kota provinsi, Kota Bengkulu

⁵⁵ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Sekilas Bengkulu* (Bengkulu: Pemprov Bengkulu, 2020), hlm. 5.

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil Bengkulu.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.

mengalami perkembangan pesat dalam bidang infrastruktur, ekonomi, serta sosial budaya. Perluasan wilayah administratif juga terjadi pada 1986, ketika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km², mencakup empat kecamatan, 38 kelurahan, dan 17 desa.⁵⁹

Dari sisi pembangunan, kota ini mengalami kemajuan melalui peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lain yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.⁶⁰ Dalam sektor ekonomi, Bengkulu mengembangkan potensi lokalnya terutama pada bidang pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi salah satu andalan utama dengan daya tarik seperti Pantai Panjang, Air Terjun Curup Tenang, dan Taman Wisata Alam Boven Lais.⁶¹

Selain itu, Kota Bengkulu dikenal sebagai daerah dengan keragaman etnis dan budaya. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok suku, antara lain Melayu, Minangkabau, Rejang, dan Tionghoa, yang hidup berdampingan secara harmonis.⁶² Keanekaragaman tersebut tercermin dalam adat istiadat, bahasa, dan seni budaya setempat. Salah satu warisan budaya yang masih

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Bengkulu.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Kota Bengkulu dalam Angka 2020* (Bengkulu: BPS, 2020), hlm. 15.

⁶¹ Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, *Panduan Wisata Bengkulu* (Bengkulu: Dispar Kota Bengkulu, 2019), hlm. 12.

⁶² Riwanto Tirtosudarmo, *Mobilitas Penduduk dan Integrasi Nasional* (Jakarta: LIPI Press, 2009), hlm. 142.

dilestarikan hingga kini adalah tradisi Tabot, yaitu peringatan Asyura yang diselenggarakan setiap tahun dan telah menjadi ikon budaya khas Kota Bengkulu.⁶³

D. Biografi Gubernur Soeprapto

Drs. H. Soeprapto lahir di Pulorejo, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, pada 27 Agustus 1929. Ia menikah dengan Raden Ayu Soedarjatin dan dikaruniai dua orang putra serta dua putri.⁶⁴ Sebelum berkarier di pemerintahan Provinsi Bengkulu, Soeprapto meniti perjalanan birokrasi di Jawa Timur. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Camat Warujayeng, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, hingga kemudian dipercaya menjadi Bupati Nganjuk.⁶⁵

Pada 16 Juli 1979, Soeprapto dilantik sebagai Gubernur Bengkulu, menggantikan Ali Amin. Ia menjabat selama dua periode, yakni dari 16 Juli 1979 hingga 16 Juli 1989. Selama masa kepemimpinannya, Soeprapto dikenal sebagai sosok yang tegas, berdisiplin tinggi, serta berkomitmen kuat dalam mendorong pembangunan daerah. Salah satu fokusnya adalah memperkuat infrastruktur dasar di Bengkulu, meningkatkan pelayanan publik, dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.⁶⁶ Jika dikaitkan dengan teori sifat atau karakteristik kepribadian (*trait*

⁶³ M. Syamsudin, *Tabot: Tradisi Budaya Religius di Bengkulu* (Bengkulu: UMB Press, 2016), hlm. 30.

⁶⁴ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Profil Gubernur Bengkulu dari Masa ke Masa* (Bengkulu: Pemprov Bengkulu, 2018), hlm. 21.

⁶⁵ Dinas Arsip dan Perpustakaan Jombang, *Tokoh Jombang dalam Lintasan Sejarah* (Jombang: Disarpus Jombang, 2015), hlm. 67.

⁶⁶ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bengkulu, *Sejarah Pembangunan Provinsi Bengkulu* (Bengkulu: Diskominfo, 2019), hlm. 45.

theory), kepemimpinan Soeprapto menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memimpin tidak semata-mata ditentukan oleh jabatan atau situasi, tetapi oleh kualitas kepribadian yang melekat pada diri pemimpin. Teori ini berasumsi bahwa individu tertentu memiliki sifat-sifat alamiah seperti ketegasan, kepercayaan diri, kedisiplinan, serta pandangan jauh ke depan yang membedakan mereka dari orang lain. Dalam hal ini, sikap tegas dan disiplin Soeprapto dapat dipahami sebagai cerminan dari ciri-ciri kepemimpinan efektif sebagaimana dijelaskan dalam teori sifat, di mana keunggulan personal menjadi faktor utama yang mendorong efektivitas dan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Setelah masa jabatannya berakhir, Soeprapto diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden Republik Indonesia.⁶⁷

Soeprapto wafat pada 7 Oktober 2003 dalam usia 74 tahun. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya, nama beliau diabadikan pada sejumlah fasilitas publik. Di Bengkulu, nama Soeprapto digunakan untuk Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto, yang menjadi rumah sakit rujukan bagi wilayah Sumatera bagian selatan. RSKJ tersebut bahkan telah memperoleh akreditasi paripurna pada 2017.⁶⁸ Selain itu, di

⁶⁷ Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), *Ensiklopedia Lembaga Tinggi Negara* (Jakarta: Lemhannas Press, 2004), hlm. 103.

⁶⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Daftar Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna 2017* (Jakarta: Kemenkes, 2017), hlm. 56.

beberapa daerah lain namanya juga diabadikan, misalnya sebagai nama jalan di Padang, Sumatera Barat.⁶⁹

Keluarga besar almarhum Soeprapto pun tetap melanjutkan kontribusi sosialnya bagi masyarakat. Salah satu buktinya adalah pembangunan Masjid Jami' Soeprapto Soeparno di Bangka Belitung, yang diresmikan pada tahun 2015. Kehadiran masjid tersebut tidak hanya menjadi sarana ibadah, melainkan juga pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang memperkuat hubungan keluarga beliau dengan masyarakat setempat.⁷⁰ Dengan demikian, Drs. H. Soeprapto dikenang sebagai birokrat yang berintegritas, berdedikasi tinggi, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.

⁶⁹ Pemerintah Kota Padang, *Daftar Nama Jalan Kota Padang* (Padang: Pemkot Padang, 2020).

⁷⁰ Republika, "Masjid Jami' Soeprapto Soeparno Resmi Berdiri di Bangka Belitung," 12 Agustus 2015.